**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Bank Dunia beserta *International Finance Corporations* (IFC) disebut sebagai *World Bank Group*. Pada tahun 1947, resmi menjadi badan khusus PBB. Kantor utamanya bermarkas di wilayah negara pemegang saham terbesar yaitu Amerika Serikat di kota Washington DC. Tujuan utamanya tercantum dalam pasal 1 *Articles of Agreement* yaitu[[1]](#footnote-1) untuk membantu pembangunan negara-negara anggota, memajukan penanaman modal asing, memberikan bantuan pinjaman keuangan untuk tujuan produktif, memajukan pertumbuhan perdagangan internasional, memelihara neraca pembayaran, mengelola pinjaman untuk proyek yang bermanfaat, mendesak dan melakukan kegiatan lainnya dengan memperhatikan akibat penanaman modal internasional pada kondisi bisnis di wilayah anggotanya.

Bantuan keuangan tersebut diberikan dengan tingkat bunga konvensional. Kegiatan pada tahun pertama berdirinya badan ini adalah memberikan bantuan untuk pembangunan negara-negara Eropa Barat yang hancur ekonominya setelah Perang Dunia II. Kemudian Bank Dunia memberikan bantuannya kepada pembangunan proyek infrastruktur di negara-negara berkembang.[[2]](#footnote-2)

Pembangunan yang dilakukan dengan memberikan bantuan keuangan yang berorientasi pada pertumbuhan dan memperluas arus ekonomi pasar yang dipromosikan negara-negara industri dalam rezim ekonomi internasional hasil *Bretton Woods[[3]](#footnote-3)* dalam rangkauntuk menciptakan gelombang industrialisasi dan modernisasi.[[4]](#footnote-4) Sebagaimana yang diungkapkan oleh Brown dan Ainley. Meskipun *Bretton Woods System* berakhir pada era 1970an, namun institusi bentuknya tetap ada dan terus melaksanakan agenda neoliberalnya hingga sekarang.[[5]](#footnote-5)

Seiring kebangkitan ideologi neoliberal, Bank Dunia membuka, memperluas pasar dan ekonomi kapitalis. Gagasan neoliberal ini tertuang dalam rangkaian kebijakan *Structural Adjustment Programs/*SAPs yang mmiliki tiga pilar utama yaitu liberalisasi perdagangan dan keuangan, deregulasi dan privatisasi. Rangkaian kebijakan ini dalam praktiknya dipaksakan kepada negara-negara berkembang sebagai syarat untuk memperoleh bantuan keuangan. Pada prinsipnya SAPs diberlakukan untuk mengoptimalkan mekanisme pasar dan meminimalisir peran negara dalam bidang ekonomi, yang dalam pandangan kaum neoliberal merupakan jalan terbaik bagi suatu negara untuk keluar dari krisis.

Negara-negara penerima SAPs[[6]](#footnote-6) sebetulnya belum siap untuk menerapkan liberalisasi ekonomi yang dipaksakan oleh *World Bank*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksiapan negara-negara berkembang seperti infrastruktur, faktor produksi dan pasar bebas. Ketidaksiapan negara-negara berkembang sudah tentu kalah bersaing dengan produk negara-negara maju. Dampak liberalisasi ekonomi di negara-negara Dunia ketiga tidak mendatangkan efisiensi ekonomi di pasar internasional, melainkan semakin mengakibatkan matinya perusahaan-perusahaan lokal yang belum matang untuk berkompetensi.[[7]](#footnote-7)

Sejarah masuknya Bank Dunia di sektor minyak kelapa sawit Indonesia ada sejak tatanan perkebunan sawit zaman kolonial Hindia Belanda maupun semenanjung Malaya, yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta asing yang berciri khas investasi padat modal dan padat tenaga buruh dengan dukungan dari Bank Dunia. Perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan yaitu mengubah bentang hutan tropis menjadi perkebunan monokultur skala besar. Sejalan maraknya pembukaan hutan lewat izin pembalakan, hal ini turut mendorong menggeliatnya industri minyak sawit yang bermula sejak akhir dekade 1960-an.

Perkebunan sawit yang dimiliki negara (PT Perkebunan Nusantara) mulai bertumbuh pada tahun 1970-an sedangkan perkebunan petani kecil mengalami perkembangan setelah 1979.[[8]](#footnote-8) Pengembangan perkebunan ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan disinergikan dengan pengembangan program transmigrasi. Tujuan transmigrasi adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial dari pulau-pulau berpenduduk padat, mengurangi tingkat pengangguran, relokasi tenaga kerja ke daerah lain, memperkuat kesatuan nasional melalui integrasi etnis dan peningkatan standar hidup orang miskin.

Proyek transmigrasi ini dianggap gagal karena dalam beberapa kasus terjadi bentrokan antara penduduk lokal dan transmigran dan beberapa hutan tropis menjadi rusak karena dibuka menjadi ladang pertanian terutama tanaman kelapa sawit. Proses transmigrasi dilakukan untuk pembangunan fisik seperti memperluas lahan dengan tanaman kelapa sawit dan pabrik. Menurut salah satu laporan negara yang mengemukakan, seharusnya nilai pembangunan dari sebuah negara terbukti efektif ketika pembangunan menghasilkan realisasi yang lebih baik, dapat diterima dan progresif dari masyarakat, sebagai berikut:

“Ketidakseimbangan dalam kepemilikan lahan semakin meningkat dan menciptakan kesenjangan yang nyata antara kelompok miskin yang tidak memiliki tanah dan para pemilik tanah yang lebih kaya. Konsolidasi, akumulasi lahan keluarga dan individual yang lebih kaya telah meningkatkan jumlah rumah tangga pedesaaan yang tidak memiliki lahan.”

(*World Bank* Vietnam 2000, Vietnam News 1999 - 2011).[[9]](#footnote-9)

*World Bank* adalah salah satu sumber dana terbesar di dunia terutama bagi Indonesia yang terdiri dari lima institusi salah satunya adalah [*International Finance Corporation*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Finance_Corporation&action=edit&redlink=1)(IFC). Yang pada dasarnya untuk mempromosikan [investasi luar negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi_asing_langsung), [perdagangan internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional) dan memfasilitasi investasi [modal](https://id.wikipedia.org/wiki/Modal).[[10]](#footnote-10) Misi yang dibawakan Bank Dunia ke Indonesia sudah berjalan lama sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga sekarang. Misi yang paling kentara adalah investasi berkelanjutan melalui [*International Finance Corporation*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Finance_Corporation&action=edit&redlink=1) (IFC) terutama dalam sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit dengan kerjasama dari berbagai klien dan pemangku kepentingan dengan menggunakan pendanaan langsung maupun tidak langsung dan jasa pendamping teknis.

Tujuan spesifik *World Bank* yang tercermin pada kinerjanya adalah investasi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, pembagian keuntungan dengan masyarakat-masyarakat setempat dan pemilik perkebunan, penerapan kebiasaan-kebiasan lingkungan dan sosial serta mempromosikan sertifikat untuk mendirikan standar berkelanjutan RSPO di pasar. Pendanaan langsung dan tidak langsung bersamaan dengan jasa pendamping teknis yang berhubungan dengan pembangunan sektor swasta merupakan inti dari kegiatan usaha IFC.[[11]](#footnote-11)

Pembangunan yang dilakukan IFC di sektor minyak kelapa sawit mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan membiayai investasi sektor swasta, memobilisasi modal di pasar keuangan internasional, menyediakan jasa konsultasi kepada perusahaan dan pemerintah dalam sektor industri minyak kelapa sawit. [*International Finance Corporation*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Finance_Corporation&action=edit&redlink=1)(IFC) menawarkan berbagai produk keuangan, jasa kepada klien dan mengembangkan alat keuangan baru yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko dan memperluas akses mereka ke pasar modal asing dan domestik. Sebuah perusahaan atau pengusaha yang ingin mendirikan bisnis baru atau memperluas usaha yang sudah ada bisa mendekati IFC langsung dengan mengirimkan sebuah proposal investasi. Setelah kontak dan peninjauan awal, IFC dapat melanjutkan dengan meminta studi kelayakan rinci atau rencana bisnis untuk menentukan apakah rencana proyek tersebut diterima atau tidak. Seperti investor sektor swasta dan pemberi pinjaman komersial lainnya, disamping itu IFC juga mencari keuntungan, mengenakan biaya atas pendanaan dan jasanya disesuaikan dengan keadaan pasar serta secara bersamaan menanggung resiko-resiko yang ada dengan mitranya.[[12]](#footnote-12)

Keterlibatan IFC dalam sektor minyak kelapa sawit didorong oleh potensinya untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana ditunjukkan di dalam dokumen IFC. Mengingat sektor swasta telah dan akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan di sektor kelapa sawit. IFC ikut berperan dalam mendukung dan menganalisis keterlibatan sektor swasta yang berkelanjutan. Strategis IFC dalam sektor minyak sawit dipandu oleh komitmen WBG yang lebih luas untuk mendukung negara-negara klien dalam meningkatkan kontribusi pertanian terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat miskin dan kelestarian lingkungan.[[13]](#footnote-13)

IFC juga menawarkan berbagai jasa konsultasi untuk mendukung pengembangan sektor swasta di negara-negara berkembang. Kegiatan konsultasi dari IFC ini disusun menjadi empat area bisnis yaitu akses terhadap pembiayaan, iklim investasi, usaha yang berkesinambungan dan kemitraan pemerintah dengan swasta. Alasan IFC memilih untuk berinvestasi di sektor minyak kelapa sawit adalah dimana perkebunan sawit dianggap sebagai salah satu pintu bagi investasi jangka panjang maupun jangka pendek baik yang berbentuk obligasi, derivatif, suku bunga maupun melalui pembiayaan investasi asing langsung dan karena Indonesia sebagai penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia yang memiliki cakupan lahan yang luas, oleh pengusaha sawit disebutsebagai *land bank (LB)* maupun penguasaan secara “biologis” atas konsesi perkebunan yang diterbitkanmelalui bentuk perijinan negara dalam bentuk keputusan pejabat publik.[[14]](#footnote-14)

Hubungan bisnis dan rantai keuanganyang bekerja dalam operasi perkebunan sawit dilancarkan di bawah operasi kontrol dan aktivitaskeuangan yang bersifat global. Hubungan tersebut bersifat kepentinganpasar maupun terkait dengan sisi suplai. Keterlibatan Bank Dunia dalam perkebunan sawit bukan hanya sebagai pemberi pinjaman tetapi harus memiliki saham secara langsung.[[15]](#footnote-15) Hal ini membuat para perusahaan berlomba untuk berinvestasi dengan meminjam uang dari Bank Dunia. Menurut laporan Bank Dunia dari buku yang berjudul *Doing Business* 2015, Indonesia menempati rangking 155 dari 189 negara dalam kemudahan membuat usaha.[[16]](#footnote-16)

Dengan adanya keuntungan yang didapatkan IFC di sektor minyak kelapa sawit yang didukung oleh sembilan konsultasi dari berbagai pemangku kepentingan lebih dari 2.500 di 30 negara. Dari dukungan tersebut, memberi masukan praktis yang mendalam dari para ahlinya serta analisa tambahan terhadap usaha *World Bank Group* (WBG) dalam menilai keuntungan dan risiko dari sektor tersebut. Keterlibatan Bank Dunia dengan kelompoknya IFC dari hasil laporan pembangunan, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berasal dari pertanian tiga kali lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dibandingkan dengan pertumbuhan yang berasal dari sektor lainnya. Investasi IFC dalam pertanian secara drastis telah meningkat dalam lima tahun terakhir, diperkirakan sekitar $14 miliar dibutuhkan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan investasi pertanian di negara berkembang. Menurut Bank Dunia, hal ini mengindikasikan bahwa investasi sektor publik tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi permintaan tersebut, maka untuk itu investasi publik dan swasta diperlukan untuk mendorong perekonomian dan mengurangi kemiskinan.[[17]](#footnote-17)

Ada empat pilar keterlibatan Bank Dunia dalam sektor minyak kelapa sawit untuk berinvestasi yaitu dengan cara menghasilkan perkembangan dan pendapatan, berkontribusi dalam keamanan pangan sekaligus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan atas sumber daya dan lingkungan hidup. Strategi dan program kerja *World Bank* di setiap negara secara khusus ditentukan oleh prioritas pembangunan dan minat dari sektor swasta. *World Bank* telah mengidentifikasi empat pilar yang dapat digunakan yaitu saling bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk menguatkan perekonomian dan penyokong lingkungan hidup serta unsur sosial pada sektor tersebut, sebagai berikut.[[18]](#footnote-18)

*Pertama,* lingkungan kebijakan dan peraturan, permasalahan mengenai akuisisi tanah, jangka waktu kepemilikan tanah terutama sejauh mana integrasi infrastruktur ke dalam proyek dan kepentingan dari manajemen kapasitas secara khusus di dalam perkebunan sektor publik, tata kelola hutan dan hak dari pekerja. Kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan, maka implementasi mengarah pada sistem administrasi, perencanaan penggunaan lahan, penilaian dampak lingkungan, peraturan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan dalam melindungi keanekaragaman hayati, melindungi hak dari pekerja dan masyarakat setempat. *Kedua,* investasi sektor swasta yang berkelanjutan. Saat kebijakan pemerintah dan peraturan mengijinkan, investor sektor swasta dapat memastikan bahwa investasi pada sektor tersebut akan menghasilkan keuntungan ekonomi dengan cara yang berbasis lingkungan hidup dan sosial yang berkelanjutan dengan menggunakan pendanaan langsung maupun tidak langsung oleh jasa pendamping teknis.[[19]](#footnote-19)

*Ketiga,* pembagian keuntungandengan pemilik perkebunan dan masyarakat bersama memperbaiki distribusi keuntungan kepada masyarakat setempat dan petani pemilik perkebunan. Ini sudah berlangsung lama sejak tahun 1970, dimana industri agro skala besar telah melihat transformasi dari pengelolaan perencanaan yang bersifat langsung menjadi metode yang lebih fleksibel bagi petani untuk dapat memilih cara yang paling tepat. Pendekatan ini menawarkan kesempatan yang nyata bagi pembagian keuntungan. Selain itu, *World Bank* membantu mengidentifikasikan dan meningkatkan model usaha inklusif, berinvestasi pada infrastruktur yang memungkinkan para pemilik perkebunan dapat mengakses pasar, memperkuat produktivitas dari para pemilik perkebunan dan mengembangkan inovasi mekanisme keuangan untuk menyediakan akses terhadap pendanaan.[[20]](#footnote-20)

*Keempat,* aturan dalam praktik berkelanjutan dengan penyusunan, penerapan dan implementasi dari standar komoditas khusus yang berkelanjutan dan kode praktik termasuk sistem sertifikasi dan diiringi oleh persyaratan peraturan yang menunjang merupakan cara yang efektif untuk mencapai perubahan sektoral secara menyeluruh pada industri tersebut. Maka *World Bank* dapat mendukung pengembangan dan mempercepat adopsi dari standar dan praktek tersebut.[[21]](#footnote-21)

Pemerintah Indonesia turut serta mendukung misi yang dilakukan oleh Bank Dunia yaitu memperluas sektor sawit dengan tujuan untuk melipat gandakan produksi di tahun 2020 dan mendapat sambutan positif dari investor yang cukup besar untuk ikut serta dalam proyek pengembangan BBN.[[22]](#footnote-22) Target produksi adalah untuk memperbaki ketidakselarasan antara provinsi dengan kabupaten di bawahnya dalam memperluas sektor ini dan untuk mengoptimalkan hasil melalui perencanaan yang cermat. Berbagai aktor ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat lokal, provinsi maupun nasional yang ada di Indonesia.

Para pelaku ini digolongkan ada dua yang membantu mendukung sektor industri dan tanaman kelapa sawit itu sendiri yaitu pelaku sekunder dan primer. Pelaku sekundernya adalah pejabat pemerintah pusat dan anggota DPR yang menetapkan kebijakan nasional, mengembangkan undang-undang dan peraturan, memformulasikan rencana pembangunan, mengawasi proses pembuatan perundangan, menetapkan kerangka fiskal dan menyetujui rencana tata ruang perusahaan-perusahaan swasta yang mempengaruhi lokasi, skala dan ketentuan investasi sawit, memimpin negosiasi dengan masyarakat mengenai pembebasan lahan untuk dikembangkan, ketentuan perjanjian kemitraan dengan petani kecil dan skala investasi pembangunan masyarakat menurut undang-undang yang menerima atau menolak pengembangan sawit di lahan yang mereka klaim dan menegosiasikan ketentuan-ketentuan kemitraan dengan perusahaan. Sedangkan pelaku sekunder ini di antaranya mencakup Bank, kelompok penelitian, media, konsumen internasional, LSM dan masyarakat sipil.[[23]](#footnote-23)

Kelapa sawit menjadi pro dan kontra di masyarakat dunia dengan alasan membawa dampak deforestasi bagi hutan Indonesia seperti penebangan liar (*illegal logging*), peralihan fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar bagi tanaman industri dan penebangan yang tidak lestari (*unsustainable logging*).[[24]](#footnote-24) Akibatnya hutan menjadi hilang, maka perlu dari pemerintah untuk memperbaiki undang-undang mengenai investasi kelapa sawit agar tidak merusak lingkungan.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian guna menganalisa lebih dalam tentang bagaimana dan seperti apa peran *World Bank* di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia ke dalam skripsi dengan judul:

**“Peran *World Bank* Dalam Investasi di Sektor Tanaman dan Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Terhadap *International Finance Corporation* (IFC).”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis mengajukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran *World Bank* melalui *International Finance Corporation (*IFC) di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia?
2. Seperti apa bentuk investasi *International Finance Corporation (*IFC) di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia?
3. Bagaimana *World Bank* mengatasi dampak tanaman dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia?
4. Seperti apa kerangka kerja *World Bank* dan *International Finance Corporation (*IFC) di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi masalah ini dengan menitik beratkan pada peran *World Bank* melalui [*International Finance Corporation*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Finance_Corporation&action=edit&redlink=1)(IFC) yang berpengaruh besar di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia dengan menggunakan analisis politik bisnis internasional yang bertujuan pada investasi berkelanjutan.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka perumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu:

“**Bagaimana peran dan kerangka kerja *World Bank* melalui *International Finance Corporation (*IFC) di Sektor Tanaman dan Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia?”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodelogis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *World Bank* melalui *International Finance Corporation (*IFC) di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk investasi *World Bank* di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak tanaman dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia.
4. Untuk mengetahui kerangka kerja *World Bank* dan *International Finance Corporation (*IFC) di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia.

**1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah untuk memberikan manfaat kepada para pembaca, mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah HI dalam bidang Politik Bisnis Internasional khususnya soal investasi.
2. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dengan memperdalam pengetahuan sehubungan dengan peran *World Bank* dalam investasi di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia.
3. Sebagai masukan dan bahan komparatif bagi penelitian sejenis serta menjadi sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
   1. **Kerangka Teoritis, Asumsi dan Hipotesis**
      1. **Kerangka Teoritis**

Dalam kerangka teori ini, penulis mencoba untuk mengemukakan teori dan konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan penelitian tersebut, khususnya tentang peran *World Bank* dalam investasi di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui *International Finance Corporation (IFC)*.

Dalam disiplin kajian hubungan internasional, menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam bukunya yang berjudul politik bisnis internasional melihat ada empat persoalan yang paling dominan dalam politik bisnis. *Pertama,* menyangkut negara sebagai aktor penting dalam transaksi bisnis antar negara. *Kedua,* sistem pembagian kerja internasional yang melahirkan sebuah ketimpangan sistemik dimana negara maju berkonsentrasi pada produk manufaktur dengan nilai tambah yang besar, sementara negara berkembang berkonsentrasi pada produksi bahan mentah dengan nilai tambah kecil. *Ketiga,* konteks historis dan politis sistem perekonomian dunia dengan menfokuskan pada interaksi antara unsur negara (*state*), pasar (*market*), kekuasaan (*power*) dan kemakmuran (*plenty*). *Keempat,* struktur dan institusi ekonomi internasional.

Menurut Robert Gilpin politik bisnis internasional dari perspektif liberalisme menyatakan bahwa:

“Politik bisnis internasional sebagai transaksi bisnis antar bangsa yang berjalan di bawah sistem pasar bebas (*free market*), keterbukaan dan prinsip non diskriminasi.”[[25]](#footnote-25)

Dari pengertian diatas, bahwa politik bisnis internasional dilihat sebagai fenomena ekonomi dan bisnis internasional yang seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sekuensi dari pelbagai peristiwa rutin dengan hasil akhir yang bisa diprediksi melainkan harus dilihat sebagai suatu gabungan dari pelbagai hubungan sosial (kelas, etnis dan regional) yang membentuk struktur-struktur tertentu dengan pola yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Maka dalam melihat transaksi bisnis antar bangsa seharusnya bukanlah negara sebagai kesatuan melainkan *agency* yang terdiri dari konsumen, produsen, perusahaan, kelompok kepentingan dan buruh (Gill. 1993:24).

Menurut Robert Gilpin ekonomi politik internasional merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekayaan dan kekuasaan dalam hubungan internasional. Aspek ekonomi dari sistem internasional memiliki kekuatan dominan semenjak revolusi industri karena persaingan semakin tajam, adanya kebutuhan akan pasar dan tenaga kerja murah serta upaya mendapatkan bahan mentah dan sumber daya energi maka aplikasinya terhadap politik internasional menjadi berlipat ganda.[[26]](#footnote-26)

Dalam ekonomi politik internasional tercermin pada kalimat “pengejaran kekayaan dan kekuasaan”, karakteristik yang paling fundamental adalah persaingan. Baik melalui pemerintahannya atau tindakan langsung, setiap orang dan kelompok (melalui organisasi atau perusahaan) yang berusaha memanfaatkan ekonomi internasional untuk meningkatkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Bila dilakukan pemerintah, maka hal itu akan nampak sebagai sebuah tujuan nasional berupa kebijakan luar negeri sedangkan bila dilakukan tanpa pemerintah, hal itu nampak sebagai aktivitas transnasional, meskipun hal itu berlangsung dengan legitimasi atau proteksi seperti perdagangan yang berlangsung.[[27]](#footnote-27)

Dalam investasi yang dikejar adalah pengejaran keuntungan dan setiap unit usaha memiliki kepentingan lain diluar pengejaran keuntungan seperti peningkatan pangsa pasar, penentu harga (*price setter*) dan mendominasi produksi sektor-sektor tertentu.[[28]](#footnote-28)

Beberapa cara dapat ditempuh untuk meningkatkan keuntungan yang telah dilakukan oleh perusahaan. *Pertama,* dengan cara menaikkan harga sehingga marjin keuntungan dapat diperbesar. Tetapi tidak semua perusahaan mampu melakukan itu karena sangat bergantung pada posisi perusahaan di dalam mekanisme pasar sebagai *price setter* (penentu harga) atau *price taker* (penerima harga). Posisi sebagai *price setter* biasanya dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan monopoli produk-produk tertentu, sementara posisi *price taker* biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang harus bersaing dengan kekuatan monopoli maupun oligopoli. *Kedua,* keuntungan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pangsa pasar. *Ketiga,* keuntungan suatu perusahaan dapat ditingkatkan melalui proses “konglomerasi”,[[29]](#footnote-29) yakni diversifikasi perusahaan melalui pembentukan divisi baru yang menangani pelbagai jenis usaha, produksi, perdagangan dan investasi. Diversifikasi perusahaan biasanya menyangkut dua hal: (1) diversifikasi “horizontal” yang biasanya dicapai melalui proses merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan saingan yang dimaksud untuk mengurangi kompetisi dan meningkatkan penetrasi pasar dan (2) diversifikasi “vertikal” yang meliputi usaha untuk mengontrol seluruh proses ekonomi sejak dari pengadaan bahan baku hingga proses produksi dan distribusi barang.

Terlepas apakah perekonomian dunia liberal atau tidak, tetapi fakta menunjukkan bahwa peningkatan transaksi bisnis antar bangsa yang terjadi sejak abad pertengahan berlangsung ketika institusi-institusi sosial yang mengatur dan mengelola aktivitas komersial. Menurut Karl Polanyi (1957:710) bahwa proses reproduksi material berkembang pesat ketika sistem pembagian kerja (*division of labour*) mulai diperkenalkan. Dalam mekanisme pasar, pembagian kerja terjadi antara produsen dan konsumen. Hubungan transaksional ini ditentukan oleh harga barang atau jasa yang disepakati bersama dalam sebuah mekanisme pasar.[[30]](#footnote-30)

Dalam konteks perekonomian dunia, sistem pembagian kerja diatur sedemikian rupa misalnya negara maju berkonsentrasi pada produksi barang-barang industri berat yang padat modal dan teknologi, sementara negara miskin memproduksi bahan-bahan mentah, produk pertanian (industri ringan). Akibatnya, terjadi kesenjangan tingkat pendapatan nasional (*national income*) yang cukup signifikan antar negara maju dan miskin.

Industri keuangan menghadapi perubahan regulasi seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku nasabah serta globalisasi yang berdampak pada perubahan struktur organisasi. Oleh karena itu, komponen utama kajian struktural terhadap sistem perbankan dan keuangan adalah saluran yang mengalirkan aset keuangan dari penabung. Saluran ini melibatkan model alternatif dan kompetitif diantara perantara keuangan dengan *counter parties* dalam transaksi keuangan baik domestik maupun internasional. Ada empat jenis perusahaan jasa keuangan yaitu *pertama,* *commercial banking*, *saving banking* dan *thrift banking* yang mendominasi penghimpunan dana masyarakat dan pemberian kredit. *Kedua,* *investment banking* dan perusahaan sekuritas (*broker dealer*) yang melakukan kegiatan usaha *underwriting*, perdagangan dan distribusi efek. *Ketiga,* perusahaan berbasis pasar modal bersama dengan jasa penasehat keuangan. *Keempat,* asuransi dengan bisnis dasarnya adalah manajemen risiko.[[31]](#footnote-31)

Bank Dunia sebagai salah satu anggota PBB di bagian organ khusus. Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori. *Pertama,* sebagai instrumen yang digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. *Kedua,* sebagai arena tempat bertemu bagi anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.[[32]](#footnote-32)

Tugas Bank Dunia dalam pasal 1 sangat jelas dinyatakan, sebagai berikut. *Pertama,* untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di wilayah negara anggota. *Kedua,* untuk mempromosikan investasi swasta asing dengan menjamin dan berpartisipasi dalam *loan*. *Ketiga,* untuk mempromosikan program pinjaman jangka panjang dalam perdagangan internasional dan menyeleksi proyek yang *urgent* terhadap investasi internasional.[[33]](#footnote-33)

Menurut Herman Schwartz (1994: 44 – 45)menyatakan bahwa kesenjangan geografis antar negara merefleksikan kesenjangan domestik (petani versus tuan tanah; kasta rendah versus kasta tinggi; buruh versus manajer). Hampir sama menurut para ekonom liberal klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo yang menganggap bahwa pertumbuhan kesenjangan ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari diperkenalkannya sistem pembagian kerja internasional. Fakta ini tampak mendukung preposisi teori sistem dunia yang manyatakan bahwa ekspansi ekonomi negara pusat (*core*) selalu diawali dengan proses eksploitasi terhadap negara-negara pinggiran (*periphery*).

Pelaku utama bisnis internasional adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di pelbagai bidang seperti jasa dan komoditas yang melintasi batas-batas negara. Di dalam melakukan aktivitas bisnisnya ada dua misi yang dikuasai oleh para pebisnis yaitu penguasaan pangsa pasar bagi produk-produk yang dihasilkannya dan mengembangkan aktivitas yang dapat memaksimalisasi perolehan profit (keuntungan).[[34]](#footnote-34)

Kaitannya dalam ekonomi politik internasional dari interaksi dilihat sebagai mekanisme pasar internasional termasuk hal interdepedensi, depedensi dan globalisasi dengan sistem masyarakat internasional yaitu sistem negara (*multi state system*) dan pola hubungan antar negara serta kebijakan masing-masing pemerintah yang mempengaruhi situasi pasar internasional baik dalam bidang perdagangan seperti *term of trade*, *quota* dan proteksionisme maupun dalam bidang moneter seperti cadangan devisa dan nilai tukar mata uang.[[35]](#footnote-35)

Ekonomi politik internasional menurut Mohtar Mas’oedadalah sebagai berikut:

“Ekonomi politik internasional sebagai studi tentang saling berkaitan dan berinteraksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat.[[36]](#footnote-36)

Perdagangan bebas dan integrasi ekonomi yang berlangsung saat ini merupakan konsekuensi dari kemenangan liberalisme pasca perang dingin. Seperti yang dinyatakan oleh Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man* bahwa tatanan ekonomi politik yaitukapitalisme liberal merupakan tatanan akhir dari tata ekonomi dunia.[[37]](#footnote-37)

Kapitalisme yang dibawa oleh paham liberal ini mengalami pergeseran pemikiran guna mempertahankan dominasinya yang ditandai dengan tiga periode perkembangan. Periode *pertama* yaitu kapitalisme klasik atau kapitalisme Adam Smith yang berlangsung selama abad 19 dimana menerapkan prinsip *laissez-faire* yang memisahkan antara urusan negara dengan ekonomi. Kapitalisme liberal ini ternyata menghasilkan ketidakadilan yang tidak mampu diatasi oleh pasar. Oleh karena itu, di periode *kedua* muncul neo kapitalisme atau yang dikenal dengan neo liberalisme dimana negara melakukan intervensi guna mengatasi dampak perubahan sosial dan ekonomi akibat sistem kapitalisme klasik. Paham Keynesian merupakan landasan bagi lahirnya gagasan neo liberalisme yang menekankan peran pemerintah yang kuat dalam pasar bebas. Paradigma ini kemudian dilembagakan dalam rezim ekonomi internasional yaitu *World Bank*, IMF dan GATT. Di periode *ketiga*, kapitalisme mempertahankan dominasinya lewat kerangka perdagangan multilateral WTO. Periode ini ditandai dengan aktivitas perusahaan multinasional yang mempromosikan prinsip kapitalisme baru serta diterapkannya kebijakan deregulasi dan ekonomi terbuka khususnya di negara berkembang.[[38]](#footnote-38)

Sesuai dengan tugas Bank Dunia dalam pasal 1 mengenai investasi swasta yang menjamin dan berpartisipasi dalam *loan*, bahwa Bank mengucurkan dana melalui *International Finance Corporation* (IFC) yang berfokus di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia, telah membuka kesempatan untuk para pengusaha swasta seperti *Wilmar Group* salah satu perusahaan terbesar di dunia yang memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Tania Selatan (*Wilmar Group*) yang terletak di provinsi Sumatera, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (wilayah Selatan).

Saat ini, Wilmar mengembangkan bisnis perkebunan melalui proyek dan akuisisi untuk menekan permintaan kelapa sawit. Wilmar memiliki pabrik kelapa sawit untuk memproses buah hasil perkebunan sendiri dan perkebunan di sekitarnya menjadi minyak sawit mentah dan plasma sawit.

Selain memegang hak atas tanah untuk lahan perkebunan, Wilmar juga mengelola sekitar 39.000 hektar perkebunan kelapa sawit di bawah skema plasma Indonesia untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit bagi pemilik tanah kecil. Wilmar berkomitmen untuk membeli semua buah yang dihasilkan oleh perkebunan pemilik lahan kecil.

Perkebunan Wilmar serta proses penggilingan yang dikelola memegang teguh prinsip dan kriteria *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO dan ISCC) yang merupakan dari program plasma Indonesia.[[39]](#footnote-39) Total wilayah yang ditanami kelapa sawit Wilmar adalah sekitar 255.648 hektar, dimana sekitar 73% terletak di Indonesia. Ditambah 41.407 ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola Wilmar berdasarkan skema ‘plasma’ Indonesia.[[40]](#footnote-40)

Skema plasma (kemitraan) adalah sebuah istilah yang diturunkan dari model pengelolaan perkebunan yang diperkenalkan oleh pemerintah yaitu ‘kebun inti’ yang berarti bahwa petani plasma bekerjasama dengan perusahaan besar yang mengelola kebun inti. Merujuk pada skema plasma yang berlaku di Indonesia, pelaku usaha diperkenankan untuk membangun kebun terlebih dahulu dan kemudian menyerahkannya ke masyarakat lokal untuk dikelola dan dipanen.[[41]](#footnote-41)

Bantuan teknis yang diberikan IFC kepada perusahaan swasta yaitu membiayai para tim ahli kajian untuk penelitian seperti lingkungan, sosial dan ekonomi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi. Penelitian jasa pendamping teknis yang dilakukan oleh IFC dalam mendukung para pemilik perkebunan adalah. *Pertama*, Meneliti karakter dari para pemilik perkebunan untuk dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan mereka. *Kedua*, melakukan katalog terhadap kebutuhan masukan dan manajemen kebiasaan-kebiasaan pemilik perkebunan. *Ketiga*, menilai cara-cara potensial untuk meningkatkan akses kepada pendanaan. *Keempat*, Memberikan bahan-bahan instruksi mengenai kebiasaan-kebiasaan manajeman peternakan yang lebih baik, yang akan membantu para pemilik perkebunan menyiapkan diri untuk sertifikasi kemajuan yang telah dibuat terutama melalui keanggotaan, partisipasi pada komite teknis dan dukungan melalui *Biodiversity and Agricultural Commodities Program* (BACP).[[42]](#footnote-42)

Dalam kaitannya dengan peningkatan keuntungan, ini sukses dilakukan oleh Wilmar Groupdalam melakukan ekspansi bisnis ke manca negara dengan meningkatkan *international competitiveness* (daya saing internasional) dari waktu ke waktu. Dalam konteks bisnis internasional ini sebagai suatu mekanisme pasar bebas dan sanggup memproduksi barang dan jasa yang memenuhi standar internasional serta pada saat bersamaan dapat meningkatkan perolehan keuntungan dari produk-produk yang dihasilkan (Rapkin dan Strand, 1996:111).

Menurut Dr. Suad Husnan, MBA dan Dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akt. (1993)ada beberapa daya tarik pasar modal. *Pertama*, pasar modal diharapkan bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda utang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham). *Kedua,* pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko. Jika tidak ada pasar modal, maka para modal hanya mungkin menginvestasikan dana mereka dalam sistem perbankan (selain alternatif investasi pada *real assets*). Disamping itu, investasi pada sekuritas mempunyai daya tarik lain yaitu pada likuiditas. Sehubungan dengan itu maka pasar modal memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisien. Hanya kesempatan investasi yang menjanjikan keuntungan yang tertinggi (sesuai dengan resiko) yang mungkin memperoleh dana.[[43]](#footnote-43)

* + 1. **Asumsi**

Dalam penelitian ini, penulis membuat asumsi berdasarkan konsep politik bisnis internasional dari investasi yang dilakukan *World Bank* di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia:

1. Peran *World Bank* berperan besar di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia terutama dalam pemberian dana pinjaman untuk investasi.
2. Keterlibatan *International Finance Corporation* (IFC) di perusahaan swasta dalam memberikan pendamping teknis untuk berinvestasi.

Dengan asumsi diatas, penulis melihat ada hubungan yang dilakukan *World Bank* dan *International Finance Corporation* (IFC) dalam pemberian dana dan pendamping teknis untuk investasi.

* + 1. **Hipotesis**

Berdasarkan teori dan berbagai asumsi dalam kerangka teoritis di atas maka berikut ini penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai asumsi serta merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan:

**“Semakin besar peran *World Bank* di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit melalui *International Finance Corporation* (IFC), semakin mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi.”**

* + 1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** peran *World Bank* di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia. | 1. Adanya pendanaan yang diterima oleh perusahaan swasta dari *World Bank* melalui *International Finance Corporation* (IFC) dengan jumlah US$11,8 miliar. ([www.tuk.or.id](http://www.tuk.or.id)) 2. Adanya fungsi Bank Dunia yang tercatat pada artikel 1 yaitu untuk mempromosikan investasi dengan menjamin dan berpartisipasi pada *loan* yang dilakukan oleh IFC di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia.   (<http://www.ifc.org>) | 1. Data (fakta dan angka) mengenai adanya bantuan pendanaan untuk infastruktur seperti pembangunan pabrik pengolahan, penggilingan dan jalan. (<http://www.ifc.org>) 2. Data (fakta dan angka) mengenai struktur saham milik perusahaan swasta.   (fairfinanceguide.org) |
| **Variabel Terikat:** semakin mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi. | 1. Adanya ekspansi besar-besaran di sektor tanaman kelapa sawit Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan swasta seperti Wilmar Group.   ([www.tuk.or.id](http://www.tuk.or.id)) | 1. Data (fakta dan angka) mengenai berkembangnya industri kelapa sawit milik perusahaan swasta Wilmar Group di Indonesia.   ([www.tuk.or.id](http://www.tuk.or.id)) |
|  | 1. Adanya pemberlakuan sertifikat secara *voluntary* yang tidak mengikat bagi perusahaan swasta.   (<http://corporateaccountabilityresearch.net/njm-report-viii-wilmar>) | 1. Data (fakta dan angka) mengenai adanya bantuan teknis oleh *International Finance Corporation* (IFC) bagi perusahaan swasta di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia.   (<http://www.ifc.org>) |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

Peran *World Bank* di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesiamelalui *International Finance Corporation* (IFC)

Lembaga keuangan internasional

Didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia

Pembebasan izin buka lahan bagi perusahaan swasta maupun nasional

Untuk investasi berkelanjutan

* 1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
     1. **Tingkat Analisis**

Dalam penulisan skripsi ini, unit variabel independen (variabel yang berpengaruh) yaitu *World Bank* sebagai lembaga keuangan internasional yang berperan besardalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan investasi berkelanjutan di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia, akan dijadikan sebagai unit analisis yang dikategorikan dalam tingkat analisa sistem regional-global. Sedangkan, variabel dependen yang dijadikan sebagai unit explanasi yaitu: Indonesia sebagai produksi sektor tanaman minyak kelapa sawit”, akan digunakan penulis sebagai unit penjelas pada tingkat negara-bangsa.

Sehingga dalam merangkai jenis hubungan tingkat analisis di dalam penulisan skripsi ini, digunakan tingkat analisis korelasionis yakni unit analisis sistem regional-global dalam variabel bebas yang berpengaruh secara koheren oleh unit explanasi negara-bangsa dalam variabel terikat.

* + 1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif:

a). Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang tersedia di tengah-tengah realita yang ada. Data diorganisasikan secara sistematis untuk melukiskan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, dalam pelaksanaannya metode ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dari:

Studi kepustakaan (*Library Research*) yakni meneliti dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai bahan bacaan baik dari buku maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, badan-badan resmi maupun lembaga-lembaga lainnya maupun lewat media internet.

* 1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

1. **Kementerian Perindustrian RI**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 52-53, Kuningan Timur,

Kecamatan Setia Budi Daerah Khusu Ibu Kota Jakarta 12950.

1. **GAPKI Pusat**

Jl. KH. Mas Mansyur Kav 35 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta.

1. **Yayasan Pusaka**

Jl. Kompleks Rawa Bambu I, Jl. H No.4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520).

1. **Sawit Watch**

Jl. Perumahan Bogor Baru, Blok C1 No. 10 Kota Bogor, Jawa Barat 16127.

1. **WALHI Nasional**

Jl. Tegal Parang Utara No 14, Mampang, Jakarta Selatan.

1. **WALHI Jabar**

Jl. Cikutra Baru X No. 5 Neglasari, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40125.

1. **Perpustakaan FISIP UNPAS**

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

**1.6.2 Lamanya Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada awal bulan Mei 2016 sampai 14 Februari 2017.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari:

**BAB I Pendahuluan**

Bagian ini merupakan bagian pembuka suatu permasalahan yang diharapkan dapat menghantarkan pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Peran *World Bank* Di Sektor Tanaman Dan Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai peran *World Bank* melalui *International Finance Corporation* (IFC) di sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia, aspek pembiayaandi sektor tanaman dan industri minyak kelapa sawit Indonesia oleh *World Bank* dilihat dari manajemen persediaan kebun, pabrik dan tata kelola berkelanjutan.

**BAB III Dampak Sektor Tanaman Dan Industri Minyak Kelapa Sawit Di Indonesia**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan prospek industri minyak kelapa sawit Indonesia.

**BAB IV Kerangka Kerja *World Bank* Di Sektor Tanaman & Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai investasi berkelanjutan: pendekatan berbasis manajemen hasil dan resiko gagal bayar, standar kinerja IFC, prinsip dan kriteria RSPO

**BAB V Kesimpulan**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

1. *Articles of agreement the International Bank for Reconstruction and Development.* Lihat di Buku Huala Adolf, Hukum Ekonomi International Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* hlm. 98. [↑](#footnote-ref-2)
3. Adji Samekto, Kapitalisme Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 33-37. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hadi Soesastro, Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa(Jakarta: CSIS, 1991), hlm. 86-88. [↑](#footnote-ref-4)
5. Brown & Ainley, *Understanding International Relations*-Third Edition (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hlm.128. [↑](#footnote-ref-5)
6. SAPs diberlakukan bagi negara berkembang, karena negara berkembang dianggap sebagai negara miskin. Menurut para analisis yang dipercayai bahwa SAPs bukan jaminan untuk negara berkembang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, sebab SAPs bersandar pada ideologi neoliberal dan menjadi faktor kesenjangan global dan meningkatkan angka kemiskinan yang semakin besar. Lihat di Buku Budi Winarno, Dinamika Isu-isu Global Kontemporer (Yogyakarta: *Center of Academic Publishing*/CAPS, 2014)., hlm. 298. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-7)
8. Norman Jiwan & Oliver Pye. *The Political Ecology of Indonesia Palm Oil Industry and the Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective.* Jayati Bhattacharya (edited) (Singapura: ISEAS, 2013), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-8)
9. Afrizal, Nikodemus Ale dkk, Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat(Bogor: Perkumpulan Sawit Watch/F*orest Peoples Programme,* 2011), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bank Dunia. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia> Diakses 4 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kerangka kerja kelompok Bank Dunia dan strategi IFC untuk keterlibatan dalam sektor minyak kelapa sawit. Dalam <http://www.ifc.org> Diakses 12 September 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
16. Perkembangan Kerangka Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia: Implikasi untuk Sektor Kelapa Sawit yang Bebas dari Deforestasi dan Bebas dari Gambut.

    Dalam <http://daemeter.org/id/publication/detail/44#.WMoXY3T-JAg> Diakses 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia, *Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-21)
22. Prospek dan Permasalahan Industri Sawit. Dalam

    <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>

    Diakses 3 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sawit di Indonesia: Tata Kelola, Pengambilan Keputusan dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan Rangkuman untuk Pengambil Keputusan dan Pelaku. Dalam [www.nature.or.id](http://www.nature.or.id) Diakses 14 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca? Dalam [www.awsassets.wwf.or.id](http://www.awsassets.wwf.or.id) Diakses 18 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-24)
25. Bob Sugeng Hadiwinata, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-25)
26. Robert Gilpin, *US Power and the Multinational Corporation* (New York: Basic Books, 1975), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-26)
27. Walter Jones, Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 224-227. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bob Sugeng Hadiwinata, *Op.Cit.,* hlm. 118-120. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,* Istilah “konglomerat” dikembangkan dari terminologi dalam geologi yang merujuk pada jenis batuan tertentu yang terdiri dari berbagai fragmen dengan karakter yang berbeda-beda. Di dalam bisnis, konglomerat merujuk pada unit industri skala besar yang merupakan gabungan dari pelbagai unit usaha yang digabungkan melalui proses merger dan akuisisi. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.,* hlm. 29. [↑](#footnote-ref-30)
31. Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan (Jakarta: BooksTerrace & Library, 2005), hlm. 12-13. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ananda Ruriska Saputri. 2014. Peran ASEAN *Intergovental Commision of Human Rights* (AICHR) Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Kawasan Negara Anggota ASEAN, ejournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id. Diakses 7 April 2017. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 133. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.,* hlm. 36. [↑](#footnote-ref-34)
35. Teuku May Rudy, Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-35)
36. Moechtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S,

    1994), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-36)
37. Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (terjemahan: M.

    Sobirin) (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 37. [↑](#footnote-ref-37)
38. Adji Samekto, *Kapitalisme Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 24-39. [↑](#footnote-ref-38)
39. Penghargaan “The Best Agro Business Company” PT. Tania Selatan (*Wilmar Group*). Dalam <https://sembilanbersamamedia.wordpress.com/2012/06/13/penghargaan-the-best-agro-business-company-pt-tania-selatan-wilmar-group/> Diakses 14 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-39)
40. Angka-angka tersebut dikutip dari laman Wilmar pada bulan Desember 2012 <http://www.wilmar-international.com/our-business/plantations-palm-oil-mills/>. Skema plasma juga dikenal sebagai skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sudah ada sejak tahun 1980an, yang menjadi bagian dari program transmigrasi. Skema tersebut melibatkan petani kecil – termasuk pemilik tanah yang menyerahkan tanah untuk skema tersebut – yang digusur dari tanah mereka yang kemudian dijadikan kebun (dalam hal ini kelapa sawit) yang hasilnya kemudian dijual ke perusahaan. Skema yang dipromosikan sebagai kemitraan tersebut kerapkali berarti pengadaan buruh murah bagi perusahaan, sedangkan bagi petani kecil situasi terburuk yang mungkin adalah mereka menjadi budak karena hutang. Lihat, *'Ghosts on Our Own Land'* (Hantu di Tanah Kami Sendiri) oleh FPP dan Sawit Watch, 2006.

    [http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/ghosts-our-own-land-oil-palm-smallholders-indonesia-and-roundt Diakses 14 Maret 2017](http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/ghosts-our-own-land-oil-palm-smallholders-indonesia-and-roundt%20Diakses%2014%20Maret%202017). [↑](#footnote-ref-40)
41. Kelompok Petani Kelapa Sawit Swadaya Terbesar di Dunia Mendapat Sertifikat RSPO. Dalam [www.wilmar-internationail.com](http://www.wilmar-internationail.com) Diakses 31 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-41)
42. About the BACP.

    Dalam <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/RegProjects_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/BACP/> Diakses 3 April 2017. [↑](#footnote-ref-42)
43. Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: AMP YKPN, 1993), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-43)